

Melawan Heteroisme Negara: Lima Prinsip untuk Merangkul LGBT Indonesia

Oleh : TOM BOELLSTORFF

Indonesia dan Ancaman Intoleransi

Indonesia berada dalam ancaman—ancaman intoleransi dan penindasan sehubungan dengan orientasi seksual dan identitas gender. Apakah kita orang Indonesia atau bukan, penting untuk mengancam intoleransi, berdiri bersama orang Indonesia yang menantanginya, dan membayangkan dunia di mana siapa yang Anda cintai atau gender apa yang Anda identifikasikan tidak mempengaruhi status Anda sebagai anggota penuh masyarakat sipil. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masa depan Indonesia sebagai negara demokrasi menjadi taruhan, terutama karena di dunia, penindasan anti-LGBT seringkali berangkat dari (dan berhubungan dengan) bentuk-bentuk diskriminasi lain. Dalam kasus Indonesia, hal ini meliputi bentuk-bentuk marginalisasi, intoleransi, dan kekerasan yang berlanjut terhadap banyak wilayah di kepulauan ini (misalnya, Papua), sekaligus terhadap banyak kelompok—termasuk pekerja, petani, perempuan, dan rakyat miskin perkotaan—di mana di antara mereka sendiri terdapat individu-individu LGBT.

Artikel ini merespons serangkaian pernyataan dan aksi “anti-LGBT” beberapa pejabat pemerintahan, politikus, dan organisasi masyarakat Indonesia sebagaimana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya juga akan menggunakan akronim “LGBT” dengan pemahaman bahwa akronim ini merujuk pada rentang identitas meliputi gay, lesbian, tomboi (atau priawan, atau laki-laki trans; kurang-lebih transgender dari perempuan menjadi laki-laki), dan waria (kurang-lebih transgender dari laki-laki menjadi perempuan). Analisis ini berdasarkan pengalaman saya sebagai antropolog yang mengunjungi Indonesia pertama kali pada 1992 dan melakukan penelitian luas mengenai kehidupan LGBT Indonesia; saya juga mengacu pada penelitian para kolega saya (misalnya, Bennett and Davies 2014; Blackwood 2010; Boellstorff 2005a, 2007, 2014; Davies 2007, 2016; Murtagh 2013; Oetomo 2001; Suryakusuma 2004; Wieringa 2002; Yulius 2015).

Indonesia, bangsa dengan populasi terbesar keempat di dunia (setelah Cina, India, dan AS) dan rumah bagi umat Muslim dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan

negara mana pun, memiliki signifikansi geopolitik yang tidak dapat dilebih-lebihkan. Tidak ada visi tentang tatanan internasional yang dapat mengabaikan negara kepulauan yang besar ini, yang meliputi rangkaian budaya lokal yang ragamnya mencengangkan, budaya nasional yang hidup, dan banyak kaitan dengan budaya dan gerakan global.

Sungguh mengejutkan ketika insiden-insiden anti-LGBT yang dibahas di bawah ini terjadi. Ada jauh lebih banyak pemberitaan media dunia ditujukan kepada petinju (dan kandidat Senat) Manny Pacquiao di Filipina. Namun, kendati perbandingan yang dibuat oleh Pacquiao mengenai LGBT dengan binatang memang mengerikan, hal itu adalah pernyataan individual yang tidak mengubah kebijakan atau hukum. Lebih jauh lagi, ia [kehilangan sponsor besar Nike](#) karena komentarnya, kemudian [meminta maaf](#) atas perkataannya. Sebagai perbandingan, di Indonesia kita tidak hanya menemukan komentar anti-LGBT tetapi juga kebijakan, ancaman, dan aksi; serta sedikit sekali permintaan maaf dan sedikit kecaman di luar [lingkaran komunitas LGBT](#) dan [hak asasi](#). Hal ini mencerminkan kecilnya perhatian yang diberikan pada Indonesia dari komunitas dunia sekaligus kebutuhan mendesak untuk berbicara melawan diskriminasi yang gamblang ini.

Di bawah ini, saya mengkaji beberapa insiden anti-LGBT yang penting di Indonesia, yang terjadi pada awal 2016. Kemudian saya akan membahas apa yang berbeda dari peristiwa-peristiwa ini dibandingkan dengan yang telah terjadi di masa lalu. Setelah itu, dengan memakai kerangka untuk mendudukan peristiwa-peristiwa ini, saya memperkenalkan konsep “State Straightism” (Heteroisme Negara)”. Terakhir, saya memberikan lima prinsip yang merespons peristiwa-peristiwa ini dan implikasi luasnya.

“Darurat LGBT” yang Sebenarnya

Seperti yang dinyatakan oleh media internasional termasuk [Foreign Policy](#) dan [New York Times](#), dari akhir Januari 2016 hingga Maret 2016, serangkaian insiden anti-LGBT berlangsung dalam jangkauan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Keberadaan LGBT Indonesia sendiri disebut dengan istilah #DaruratLGBT di media sosial Indonesia, tetapi insiden-insiden anti-LGBT ini sendirilah yang merupakan “darurat LGBT” sesungguhnya yang dihadapi oleh negara ini. Rangkaian insiden tersebut terjadi begitu cepat dengan jumlah yang banyak sehingga saya tidak hendak mengklaim akan memberikan rangkuman menyeluruh. Namun, garis besarnya cukup jelas.

Pada mulanya tampaknya adalah sesuatu yang sepele: pada 24 Januari 2016, Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, merespons [penyebaran brosur](#) dari “Jaringan Dukungan Kawan LGBT” di Universitas Indonesia dengan menyatakan bahwa individu LGBT seharusnya [dilarang dari kampus](#)

[universitas](#). Pejabat tinggi pemerintah yang menantang brosur mahasiswa adalah sesuatu yang tidak biasa. Namun, yang lebih aneh lagi adalah bahwa pada hari yang sama kepala Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif tertinggi negara, menyatakan ia mendukung Nasir, bahwa “LGBT [harus dilarang](#) karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia.” Pada waktu yang hampir bersamaan, koran *Republika* memuat tulisan berjudul “[LGBT adalah Ancaman Serius](#)”, yang menyertakan wawancara dengan tokoh-tokoh politik. Koran ini (dan lainnya) selanjutnya memuat banyak tulisan anti-LGBT yang lain, yang seringkali terkait dengan rangkaian kejadian mengejutkan sesudah “insiden brosur”:

Pada 7 Februari, sebuah acara mengenai kesadaran pencegahan HIV/AIDS yang seharusnya dilaksanakan di kota Surabaya oleh kelompok nirlaba [Gue Berani dibatalkan](#) setelah dikecam oleh Soekarwo, gubernur provinsi Jawa Timur.

Pada 11 Februari, Kementerian Komunikasi dan Informasi [menuntut](#) supaya aplikasi media sosial dan layanan pesan singkat untuk ponsel pintar [menghilangkan emotikon](#) apa pun yang memperlihatkan [pasangan sesama jenis](#). Beberapa perusahaan tunduk—terutama aplikasi pesan LINE yang [menghapus](#) emotikon tersebut dari layanan mereka untuk Indonesia. Tokoh-tokoh publik, termasuk ustad terkenal Abdullah Gymnastiar, [mendukung](#) tindakan ini.

Pada 15 Februari Wakil Presiden Jusuf Kalla [meminta](#) supaya United Nations Development Program (UNDP) tidak memberikan dana bagi program-program komunitas LGBT. Walaupun UNDP saat ini sedang [tidak mendukung](#) program-program semacam itu, permintaan ini menakutkan karena organisasi-organisasi LGBT sulit sekali memperoleh dukungan dari dalam Indonesia.

Pada 17 Februari, Majelis Ulama Indonesia [menyerukan kebijakan](#) yang akan [mengkriminalisasi “aktivitas dan kampanye LGBT.”](#) [Organisasi Islam](#) lain juga membuat [pernyataan](#) serupa yang sama-sama mengandung sentimen anti-LGBT.

Pada 23 Februari, Komisi Penyiaran Indonesia [melarang](#) ditampilkannya laki-laki bergaya keperempuan-perempuan dalam semua acara televisi. Istilah yang digunakan dalam dokumen resminya adalah bahwa laki-laki tidak dapat tampil dengan “gaya berpakaian kewanitaan, riasan kewanitaan, bahasa tubuh kewanitaan, atau gaya bicara kewanitaan”. Pelarangan juga diperluas pada “penggunaan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan”; ini rujukan tidak langsung pada bahasa gay. Larangan tersebut didukung oleh para [psikolog](#) yang menyatakan bahwa hal itu dapat mendorong anak untuk terlibat dalam “penyimpangan seksual”, dan seringkali sembari menggunakan istilah merendahkan, yaitu “kebanci-bancian”. Banyak [anggota legislatif](#), [birokrasi pemerintahan](#), [organisasi non-pemerintahan](#) (termasuk setidaknya satu organisasi yang [seolah feminis](#)), dan [bahkan selebritas](#), [mendukung](#) larangan ini. Pada 4 Maret, Kementerian

Komunikasi dan Informasi mengumumkan bahwa mereka akan [merancang undang-undang](#) untuk melarang situs yang “mempromosikan propaganda LGBT”; pada dasarnya memperluas kebijakan komunikasi anti-LGBT dari televisi [ke internet](#) dan mengancam keberadaan *online* organisasi LGBT Indonesia, yang banyak di antaranya tidak memiliki kantor fisik sendiri. Juga pada 23 Februari, Menteri Pertahanan Indonesia menyebutkan bahwa gerakan LGBT [lebih parah daripada perang nuklir](#), sembari menambahkan bahwa bahayanya adalah “kita tidak dapat melihat siapa musuh kita.” Pada 27 Februari, ia mengulang pernyataan ini dengan menekankan bahwa LGBT Indonesia “tidak sesuai dengan karakter bangsa.”

Pada 24 Februari, beberapa hari setelah meningkatnya agitasi anti-LGBT di Yogyakarta, sebuah pertemuan diadakan antara anggota FPI (Front Pembela Islam, kelompok Islam kanan yang sering melakukan kekerasan) dan tokoh-tokoh lokal, termasuk kepala polisi dan pemimpin Al-Fatah, sebuah pesantren untuk waria yang saat itu beranggota sekitar 40 orang. Al-Fatah yang telah ada sejak 2008 [memperoleh perhatian internasional](#) sebagai satu-satunya institusi pendidikan Islam untuk Muslim homoseksual dan transgender di seluruh dunia. Para pemimpin lokal mendukung pendapat FPI bahwa pesantren itu merupakan “gangguan” dan [keesokan harinya Al-Fatah ditutup](#).

Juga pada 24 Februari, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mengumumkan mereka akan [mengklasifikasi](#) homoseksualitas, biseksualitas, dan transgender sebagai gangguan jiwa yang dapat disembuhkan. Sejak tahun 1993, Panduan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa dari Kementerian Kesehatan Indonesia “tidak menyebutkan homoseksualitas kecuali catatan kecil yang menyatakan bahwa itu adalah bagian dari keragaman seksualitas manusia” (UNDP 2014:24), walaupun istilah “gangguan identitas gender” memang muncul. Keputusan untuk mengklasifikasi homoseksualitas, biseksualitas, dan transgender sebagai gangguan jiwa yang dapat diobati dikuatkan dalam undang-undang mengenai kesehatan jiwa tahun 2014. Namun, undang-undang ini hanya merujuk pada istilah umum “orang dengan masalah psikiatri” dan “gangguan jiwa”. Memasukkan LGBT Indonesia ke dalam kategori ini hanya berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka dapat memunculkan imbas yang melampaui ranah medis. Walaupun organisasi-organisasi psikiatri di dunia [memprotes](#) keputusan ini, sampai saat saya menulis artikel ini belum ada penarikan kembali klasifikasi tersebut; bahkan, sudah ada wacana untuk mendorong “terapi konversi.” Pada 26 Februari, seorang jenderal dari militer Indonesia [menyatakan](#) bahwa LGBT Indonesia tidak dapat menjadi tentara.

Pada 27 Februari, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, [mengusulkan](#) peraturan yang mengkriminalisasi LGBT Indonesia, pada praktiknya mengulangi proposal yang diajukan PKS beberapa hari sebelumnya.

Setidaknya tiga partai politik [lain](#) mendukung proposal ini, dalam satu kesempatan [membandingkan](#) pelarangan LGBT dengan pelarangan komunisme dan perdagangan narkoba. Walikota Banda Aceh, ibukota provinsi Aceh, menyatakan [ia akan membentuk “tim khusus”](#) untuk merespons “masalah LGBT.”

Apa yang Berbeda?

Saya tidak menyatakan bahwa kronologi ini meliputi semua peristiwa anti-LGBT pada awal 2016, dan insiden-insiden baru terus terjadi. Saya tentu berharap yang seperti ini berkurang, tapi saya menulis dengan asumsi bahwa insiden-insiden tersebut masih akan terus berlanjut, setidaknya dalam waktu dekat.

Beberapa tanggapan yang melegakan memang telah muncul pula dari para tokoh masyarakat yang mengutuk rangkaian peristiwa tersebut dan menyerukan toleransi. Misalnya, walikota Bandung meminta supaya FPI menurunkan spanduk-spanduk anti-LGBT yang berada di sekitar Bandung. Beberapa wartawan dan akademisi menyoroti kesalahpahaman dan representasi yang salah di balik insiden-insiden anti-LGBT, atau menekankan sejarah homoseksualitas dan transgender di negeri ini. Dalam solidaritas bersama suara-suara yang merangkul ini, saya berusaha untuk membantu menjelaskan kondisi saat ini—tetapi tujuan saya sesungguhnya adalah memberikan alat konseptual untuk merespons apa yang dapat terjadi di masa depan.

Mengapa ada rangkaian insiden anti-LGBT seperti itu—dengan jangkauan dan intensitas yang belum pernah ada sepanjang sejarah Indonesia? Mengapa sekarang? Jawaban dari pertanyaan di atas tidaklah jelas. Salah satu analisis awal yang terbaik menduga-duga bahwa debat yang sensitif mengenai revisi (dan pelemahan) Komisi Pemberantasan Korupsi mungkin memainkan peran (Croft-Cusoworth 2016). Analisis tersebut menyatakan bahwa “Tahun lalu, ketika integritas [KPK] juga terancam... media lokal juga dicengkeram oleh ‘krisis’ lain yang nampaknya datang entah dari mana: apa yang disebut ‘darurat narkoba’ yang berujung pada eksekusi 14 terdakwa narkoba... Seperti halnya ‘darurat narkoba’, ‘darurat LGBT’ dibesar-besarkan oleh komentar-komentar provokatif para tokoh masyarakat di media alih-alih disebabkan oleh kejadian sebenarnya.”

Penjelasan logis ini mengantarkan kita pada pertanyaan konteks besar apa yang menciptakan kondisi yang dapat memunculkan LGBT Indonesia sebagai target yang mudah. Satu jawaban yang kurang memuaskan adalah Islam garis keras. Memang benar bahwa kebanyakan pernyataan anti-LGBT yang paling keras datang dari organisasi Islam dan kelompok yang lebih bersifat preman seperti FPI. Penutupan pesantren Al-Fatah telah menjadi salah satu imbas tragis dari kejadian-kejadian tersebut. Tetapi walaupun diskusi mengenai keragaman seksual dalam Islam seharusnya terus berlanjut, penjelasan yang hanya sehubungan dengan Islam tidak dapat dipertahankan. Banyak Muslim berbicara dengan fasih menentang aksi anti-

LGBT. Aksi-aksi tersebut pun tidak terbatas hanya dalam satu agama: peristiwa yang mendahului gelombang anti-LGBT yang diangkat dalam artikel ini adalah [tuntutan terhadap seorang eksekutif](#) hotel Four Seasons di Bali, daerah yang didominasi pemeluk Hindu, karena [membolehkan upacara pernikahan sesama jenis](#) dilaksanakan di hotel itu. Lebih jauh, bahkan ketika kelompok-kelompok Islam berpartisipasi dalam retorika anti-LGBT, bahasa dosa relatif terbungkam. Beberapa kelompok itu mengingatkan kita bahwa mereka memandang homoseksualitas sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka dan bahkan menyarankan kesalehan (atau [direbus air panas!](#)) sebagai “obat”. Tetapi kepanikan yang ada dibingkai secara berlebihan tidak dalam rangka ada jiwa yang perlu diselamatkan, tetapi dalam rangka adanya penjahat seks yang mengancam negeri.

Kepanikan seks sudah lama didokumentasikan di dunia, termasuk pada era kontemporer (Amar 2013; Lancaster 2011). Bahkan, “darurat LGBT” terjadi dalam konteks kepanikan seks yang lebih luas di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri setidaknya dari debat Undang-undang Anti-Pornografi (RUU/UU Pornografi) pada awal 2006 (Bellows 2011) dan, akhir-akhir ini, meliputi [penggusuran](#) kawasan lampu merah untuk heteroseksual. Tetapi, pada 2016, tidak hanya tak ada peningkatan kenampakan seksualitas LGBT, mereka yang terlibat dalam insiden anti-LGBT nampaknya tidak pernah menyatakan bahwa demikianlah yang terjadi. Sebaliknya, [seperti yang ditulis oleh pihak lain](#), pola yang banyak muncul adalah klaim akan adanya “gerakan” LGBT yang mengancam, baik yang tersembunyi maupun “kampanye” terbuka. Pernyataan ini menggelikan karena, walaupun ada banyak aksi heroik yang dilakukan banyak aktivis yang berdedikasi, organisasi-organisasi LGBT Indonesia tetap kecil dan kekurangan dana; mereka kebanyakan bekerja di ranah hiburan dan kesehatan masyarakat alih-alih advokasi atau visibilitas, apalagi politik. Pernyataan ini jadi tak terlalu menggelikan ketika kita mengingat bahwa gagasan tentang organisasi tanpa bentuk atau tersembunyi digunakan oleh Orde Baru Soeharto (1965-1998) untuk menjustifikasi marginalisasi, pengurangan, dan pembunuhan “para komunis”, baik yang nyata ataupun karangan. Fakta bahwa tersangka bandar narkoba dieksekusi saat “krisis” tahun 2015 adalah sesuatu yang lebih mencemaskan.

Jadi, jika “darurat” dipersepsikan sebagai organisasi dan gerakan LGBT, bukan tindakan dan identitas seksual dalam diri, apa yang seolah-olah menjadi bahayanya? Tidaklah mengejutkan bahwa salah satu tema yang diangkat adalah bahwa LGBT Indonesia mengancam anak-anak. Gagasan yang sudah basi ini mengabaikan fakta bahwa banyak anak itu sendiri merupakan LGBT, dan banyak LGBT dewasa adalah orangtua. Terlebih, hal itu mengabaikan fakta bahwa, jika semudah itu “mengubah” seseorang menjadi LGBT, heteroseksisme dan normativitas gender di Indonesia yang begitu berlebihan seharusnya bisa memastikan semua anak heteroseksual dan memiliki peran gender yang sesuai. Tetapi fanatisme sempit memang tidak membutuhkan logika: berbarengan dengan beredarnya pernyataan bahwa gerakan

LGBT yang buas mengincar anak-anak, pada 23 Februari 2016, [walikota](#) Tangerang menyatakan bahwa, karena kurangnya nutrisi, susu formula dan [mie instan](#) dapat memicu anak menjadi LGBT. Fakta bahwa penjelasan biologi gadungan ini bertentangan dengan penjelasan predator seksual yang sama gadungannya, mengenai “ancaman” LGBT, mengindikasikan bahwa perhatian terhadap anak hanyalah gejala sentimen anti-LGBT yang lebih dalam.

Sebagaimana saya nyatakan pada awal artikel ini, yang membuat “darurat LGBT” sekarang ini begitu mengkhawatirkan adalah peran yang dimainkan oleh para pejabat dan lembaga negara, serta ancaman untuk menerapkan kebijakan dan hukum anti-LGBT yang mengiringinya—yang dalam beberapa kasus sudah dilakukan dengan sangat cepat. Insiden-insiden anti-LGBT sebelumnya, seperti serangkaian serangan terhadap acara gay dan waria pada akhir 1990-an dan serangan yang memicu pembatalan konferensi regional Asia International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association di Surabaya tahun 2010, terkait dengan FPI dan kelompok Islam garis keras serupa (lihat Boellstorff 2004, 2014). Polisi dan pemerintah setempat hampir tak melakukan apa pun untuk menghentikan intimidasi dan kekerasan, tetapi mereka tidak secara aktif mendukungnya dan tidak ada pembicaraan mengenai perubahan kebijakan atau undang-undang. Bahkan, contoh keras lain dalam sejarah yang dapat saya ingat adalah kepanikan seks yang menguasai pemerintahan kolonial Belanda pada 1938, menjelang akhir kekuasaan mereka, ketika gubernur jenderal terakhir Hindia Belanda mendesak penumpasan terhadap “homo”. Tetapi preseden ini hanya parsial, terutama karena targetnya adalah ekspatriat Eropa—termasuk penangkapan korban yang paling terkenal, pelukis Jerman Walter Spies, yang diwakili oleh Margaret Mead dalam pengadilannya di Bali (lihat Boellstorff 2005a:52–54). Sebagai tambahan, sepengetahuan saya penumpasan Belanda terdiri atas penegakan hukum yang sudah ada, bukan membuat yang baru.

Poin pentingnya adalah bahwa dalam “darurat LGBT” saat ini, negara jelas terlibat, tetapi dengan cara yang berbeda dari insiden anti-LGBT 20 tahun yang lalu atau penumpasan menjelang akhir masa kolonial. Hubungan apakah ini yang muncul antara pemerintahan Indonesia dan seksualitas dan gender yang normatif?

Heteroisme Negara

Saya berpendapat bahwa “darurat LGBT” hanya berkenaan dengan anak-anak atau Islam secara tidak langsung. “Darurat” ini sesungguhnya adalah mengenai rasa kepemilikan nasional, mengenai siapa yang akan memiliki tempat dalam masyarakat madani Indonesia yang terus berkembang. Jika kita membaca apa yang sekarang menjadi ratusan halaman pernyataan anti-LGBT dari bulan-bulan awal 2016, kalimat kunci tertentu akan ditemukan: terutama variasi klaim bahwa LGBT tidak sesuai dengan “kebudayaan nasional.” Ketika anak-anak disebut, hal itu biasanya sebagai bagian dari klaim bahwa “generasi [muda](#)” berisiko untuk bersimpati dengan (dan

kemudian menjadi) LGBT. Ketika Islam (dan agama secara umum) disebut, hal itu biasanya sebagai bagian dari klaim bahwa kesalehan begitu penting bagi identitas nasional sehingga “LGBT tidak sesuai dengan konstitusi.” (Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama Pancasila, lima prinsip nasional yang saya diskusikan di bawah, bukan konstitusi). Rani Kurniati, perwakilan humas dari organisasi perempuan GRANITA, pada 23 Februari 2016 bahkan merujuk pada Garuda, burung mistik yang merupakan simbol negara (tidak berbeda dengan Elang Botak di Amerika Serikat). Ia meminta kami untuk “membayangkan sebuah Indonesia yang disimbolkan dengan Garuda dan dipimpin oleh orang LGBT. Burung itu sendiri tidak tahu gender yang mana adalah yang mana.” Variasi kalimat “kampanye menolak LGBT” juga muncul semakin banyak. Gagasan penolakan ini perlu diperhatikan karena saat saya melakukan penelitian lapangan, saya menemukan bahwa salah satu harapan yang dimiliki oleh banyak LGBT Indonesia adalah sebaliknya: diterima oleh negara.

Saya sungguh-sungguh ingin menekankan pentingnya fakta ini: panggung di mana drama anti-LGBT ini sedang dimainkan adalah bangsa ini sendiri. Walaupun ada banyak pesan dari berbagai provinsi, kota, dan bahkan desa, bahaya yang semestinya dihadirkan oleh individu LGBT tidak pernah disuarakan dalam konteks adat, suku, ataupun daerah. Apa yang terancam adalah Indonesia itu sendiri—negara, bangsa, dan generasi muda. Temuan utama penelitian saya adalah bahwa individu LGBT di negara ini memandang diri mereka sebagai LGBT Indonesia—baru kemudian LGBT Jawa, Bugis, Bali, atau etnis lain. Sebuah konsekuensi dari kerangka tersebut adalah bahwa kepulauan LGBT nasional ini dilihat sebagai satu pulau di dalam kepulauan global komunitas LGBT, yang terhubung melalui kesamaan dan perbedaan. Nampaknya beberapa elemen dari budaya nasional arus utama Indonesia telah menangkap hal itu—dengan hasil yang tragis.

Meskipun debat mengenai KPK mungkin memainkan peran dalam kemunculan “darurat LGBT”, retorika yang ada memberikan dugaan kuat bahwa faktor yang lebih penting adalah penyebaran kesetaraan pernikahan di seluruh dunia. Termasuk di dalamnya adalah legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat pada 2015, tapi juga berbagai bentuk baru pengakuan legal atas individu LGBT di negara-negara yang dekat dengan Indonesia sendiri (seperti, Australia, Filipina, Thailand, dan Vietnam). Pada Maret 2016, terdapat kasus pembatalan pernikahan antara laki-laki dan waria; mengingatkan akan betapa satu dari peristiwa-peristiwa utama yang pertama kali memunculkan LGBT Indonesia ke ranah publik adalah pernikahan tidak sah antara dua perempuan di Jakarta tahun 1980. Lebih luas lagi, penggunaan jamak istilah “LGBT” itu sendiri mengisyaratkan bahwa krisis ini diekspresikan secara nasional dengan pandangan pada tataran transnasional. Istilah “LGBT” tidak pernah digunakan di Indonesia dalam sejarah (tidak pernah muncul sekali pun dalam buku saya *The Gay Archipelago*, diluncurkan 2005, persisnya karena saya belum pernah menemukan istilah tersebut dalam Indonesia hingga saat itu).

Penggunaan istilah “LGBT” menunjukkan bagaimana kesadaran mengenai perkembangan global dalam hak asasi sehubungan dengan orientasi seksual dan identitas gender membentuk perasaan akan adanya situasi “darurat”. Hal itu memunculkan bayangan akan masa depan Indonesia yang mengakui seksualitas dan gender yang beragam. (Kendati organisasi-organisasi LGBT di Indonesia telah menyuarakan dukungan terhadap kesetaraan pernikahan, mereka tidak memiliki kenampakan [*visibility*] publik yang cukup untuk menjelaskan “krisis” ini; organisasi-organisasi tersebut juga tidak menambahkan pernyataan atau mengeluarkan pernyataan yang berbeda pada awal 2016.) Tentu saja, negara-bangsa Indonesia selama ini selalu heteronormatif dan normatif-gender sejak semula, sebagaimana diekspresikan dalam asas kekeluargaan bahwa bangsa terdiri atas banyak keluarga. Dalam sejarahnya, negara tidak pernah berkesempatan untuk menspesifikasikan bahwa keluarga ini adalah heteroseksual, karena heteroseksualitas dianggap sebagai suatu kewajiban. Dalam sebuah analisis klasik mengenai asumsi ini, Julia Suryakusuma mengembangkan gagasan “Ibuisme Negara.” Ibu adalah istilah formal, dan apa yang dapat kita sebut sebagai “ibuisme negara” ini adalah ideologi yang “mendefinisikan perempuan sebagai embel-embel dan pasangan dari suami mereka, sebagai pembuat anak negara, sebagai ibu dan pendidik anak, sebagai pengurus rumah, dan sebagai anggota dari masyarakat Indonesia—dalam urutan tersebut” (Suryakusuma 1996:101). Pada saat itu—dua puluh tahun sebelum “darurat LGBT” hari ini—Suryakusuma, seperti banyak akademisi lain, melihat bahwa “perilaku seksual, seburuk apa pun, ditoleransi jika disembunyikan, tetapi dicecar jika masuk ranah publik” (Suryakusuma 1996:101; lihat juga Brenner 1998).

Banyak peta Indonesia dari periode Orde Baru (hingga saat ini) menyertakan sosok laki-laki dan perempuan berdiri bersama sebagai pasangan dengan “pakaian tradisional”, hal yang juga muncul, contohnya, pada prangko “pakaian tradisional di Indonesia.” Pasangan diidentifikasi dengan sebuah provinsi (seperti Sulawesi Selatan, Bali, atau Sumatera Utara), sehingga “tradisi” dalam gambar-gambar ini terkait dengan perbatasan politik modern yang selalu menyertakan kelompok kebudayaan yang beragam. Paradoks yang muncul ini dapat diterima karena tujuan gambar-gambar itu adalah betul-betul untuk “mewujudkan” semboyan nasional “berbeda-beda tetapi tetap satu” (Bhinneka Tunggal Ika), dengan mengurangi perbedaan tersebut menjadi bentuk pakaian. Setiap gaya pakaian berbeda, tetapi apa yang tetap sama adalah bahwa perbedaan tersebut dikurung di dalam pasangan heteroseksual. Heteroseksualitas menyatukan bangsa. “Darurat LGBT” telah membuat heteronormativitas dan normativitas gender nasional menjadi nampak secara eksplisit, dengan gelora yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan dukungan pemerintah.

Bertolak dari gagasan Suryakusuma mengenai “Ibuisme Negara,” saya menyebut ideologi ini “Heteroisme Negara” (*State Straightism*). Heteroisme Negara adalah ideologi yang mendefinisikan orang Indonesia sebagai heteroseksual dan bergender

normatif sehingga mengucilkan LGBT Indonesia dari rasa kepemilikan akan negara, terlepas kewarganegaraan formal mereka. Tentu saja, bentuk-bentuk Heteroisme Negara ada di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat (lihat, misalnya, Canaday 2003). Apa yang berbeda dari Heteroisme Negara di Indonesia?

Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut saya telah menggunakan gagasan “homofobia politis” (Boellstorff 2004). Saya mengembangkan konsep ini ketika berusaha memahami apa yang nampaknya menjadi peristiwa-peristiwa pendahulu “darurat LGBT”: serangan pada September 1999 terhadap rapat nasional “Jaringan Lesbian dan Gay Indonesia” di Surabaya, dan pembubaran acara gay dan waria yang dilaksanakan di dekat Yogyakarta pada November 2000. Walaupun “homofobia” dan “heteroseksisme” seringkali digunakan secara bergantian, terdapat nilai eksklusif yang membedakan keduanya. Homofobia merujuk pada perasaan jijik atau penolakan fisik atas kehadiran homoseksualitas (seringkali digabungkan dengan ciri feminin pada laki-laki dan ciri maskulin pada perempuan). Sebaliknya, heteroseksisme merujuk pada kepercayaan atau ideologi bahwa heteroseksualitas adalah satu-satunya seksualitas yang alami dan bermoral. Maka, undang-undang anti-LGBT heteroseksis tetapi tidak homofobik, dan hal yang sama dapat dikatakan pada birokrasi yang menetapkannya.

Di berbagai belahan dunia, heteroseksisme dapat mengumpani homofobia dan sebaliknya. Asumsi bahwa heteroseksualitas lebih unggul dapat membentuk iklim kekerasan terhadap individu LGBT, dan perasaan jijik terhadap mereka dapat mengabadikan heteroseksualitas sebagai norma. Tetapi tidak selalu: terdapat kasus-kasus yang terdokumentasikan dengan baik mengenai relatif rendahnya heteroseksisme walaupun terdapat homofobia, dan relatif rendahnya homofobia walaupun terdapat heteroseksisme.

Satu hal yang langsung dapat kita lakukan dengan lensa analitis yang lebih akurat ini adalah mengetahui bahwa Heteroisme Negara adalah bentuk heteroseksisme, bukan homofobia. Bahkan dalam konteks heteroseksisme politis, kekerasan terhadap LGBT Indonesia di ranah publik selama ini relatif jarang. Saya mencetuskan istilah “homofobia politis” untuk mengidentifikasi kasus di mana heteroseksisme politis berubah menjadi homofobia yang ditujukan pada usaha-usaha individu LGBT untuk mengklaim ranah publik, pengakuan legal, dan inklusi sosial. Homofobia politis kemudian akan diikuti dengan tambahan berupa kekerasan pada apa yang sebelumnya hukum dan kebijakan, dan tambahan berupa emosi fobik—kemarahan dan rasa jijik—pada apa yang sebelumnya kepercayaan dan ideologi.

Krisis “anti-LGBT” seperti yang muncul pada Januari dan Februari 2016 tetap secara umum ada di ranah heteroseksisme. Krisis itu mengambil wujud berupa serangkaian pernyataan dan aksi, dari berbagai sektor dalam masyarakat sipil, yang membuat Heteroisme Negara menjadi eksplisit dan mengajukan kebijakan dan hukum untuk

mengatur dan memperluasnya. Semua ini perlu dikhawatirkan. Apa yang memperkuat kekhawatiran tersebut adalah, seperti yang telah saya sampaikan di atas, walaupun heteroseksisme dan homofobia berbeda, keduanya dapat memperkuat satu sama lain. Satu elemen kunci dari hubungan tersebut adalah bilamana tindakan pemerintah bergerak dari pernyataan, kebijakan, dan hukum menjadi penahanan dan penutupan tempat-tempat pertemuan LGBT. Ini persisnya apa yang terjadi pada 22 Februari 2016, saat terdapat laporan berita mengenai [ancaman penahanan](#) di sebuah area luar ruangan di kota dekat Surabaya, yang sering dikunjungi oleh laki-laki gay dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Ancaman itu meliputi seruan akan pencahayaan yang lebih terang dan “perombakan” supaya area tersebut menjadi tempat yang tidak nyaman untuk sosialisasi yang demikian. Pada 12 Maret 2016, terdapat penangkapan atas delapan laki-laki di tempat sosialisasi gay yang terkenal di Surabaya, lengkap dengan pemberitaan media yang menyetujui aksi tersebut. Razia polisi di area sosialisasi gay memang telah terjadi sebelumnya, tetapi biasanya jarang. Kali ini, tindakan itu berlangsung dalam konteks meningkatnya ancaman kekerasan sehingga kelompok-kelompok LGBT menyiagakan [rumah aman](#) dan menghindari pergi ke kantor mereka yang apa adanya. Mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang seolah merupakan pemicu “darurat” ini, acara-acara akademik mengenai isu LGBT dibatalkan di beberapa kampus, dan ini berkontribusi pada berkurangnya ruang untuk mendiskusikan isu-isu tersebut.

“Darurat LGBT” berkontribusi pada perluasan Heteroisme Negara yang menyesakkan, yang mengancam posisi Indonesia LGBT dalam masyarakat sipil negara ini, dan dapat berimbas pada bentuk-bentuk baru homofobia yang lebih luas dan berpayung hukum. Ini adalah pengkhianatan terhadap harga diri dan hak asasi LGBT Indonesia, dan pengkhianatan terhadap prinsip keberagaman dan toleransi, dengan apa Indonesia tegak berdiri.

Kesimpulan: Lima Prinsip melawan Heteroisme Negara

Walaupun dalam artikel ini saya tidak ragu untuk menekankan solidaritas saya pada LGBT Indonesia, saya peka terhadap fakta bahwa saya sendiri bukan orang Indonesia. Bentuk-bentuk advokasi internasional memang penting, tapi solusi “darurat LGBT” adalah hal yang perlu ditemukan oleh orang Indonesia, dengan syarat penting bahwa LGBT Indonesia sendiri merupakan bagian dari negara dan bagian dari solusi. Apa yang bisa saya lakukan di sini adalah menyusun—sebagai alat untuk diskusi—lima prinsip melawan Heteroisme Negara. Seperti yang saya sebut sebelumnya, Pancasila atau “Lima Prinsip,” yang pertama kali disusun oleh presiden pertama, Sukarno, pada 1945, adalah elemen penting ideologi negara. Saya memberikan lima prinsip yang mengakui ideologi tersebut, tetapi “prinsip-prinsip” saya hanyalah pokok-pokok tentatif untuk dipikirkan, sama sekali tidak otoritatif atau tetap. Mengingat dua sila dari Pancasila adalah “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia,” pokok-pokok ini pun, saya harap, merefleksikan yang terbaik dari sejarah politik Indonesia yang kaya dan inklusif.

Prinsip Pertama: Homoseksualitas dan Transgender telah Menjadi Bagian dari Banyak Tradisi di Kepulauan Indonesia

Sebagaimana yang telah dinyatakan banyak orang (termasuk respons terhadap insiden anti-LGBT [akhir-akhir ini](#)), homoseksualitas dan transgender tidak secara tiba-tiba terdampar di pesisir Indonesia. Keduanya telah menjadi bagian dari banyak kebudayaan lokal di seluruh nusantara, sejauh yang tercatat dalam rekaman sejarah. Kebanyakan tidak terbuka secara publik—romansa, cinta, dan hasrat yang tidak diakui tenggelam dalam sejarah—tetapi terkadang homoseksualitas dan transgender diakui secara formal dengan cara tertentu. Dua contoh populer mengenai ini adalah hubungan *warok-gemblak* dari daerah Ponorogo di timur Jawa, di mana aktor laki-laki terkadang memiliki hubungan seksual dengan murid laki-lakinya (karena hubungan seks dengan perempuan dapat melemahkan kekuatan mistis mereka). Contoh lain adalah *bissu*. Dalam kebudayaan Bugis di selatan Sulawesi, *bissu* sudah ada sejak era sebelum Islam. Mereka menjaga lambang-lambang kebesaran kesultanan dan memiliki kekuatan mistis lain; kebanyakan terlahir sebagai laki-laki namun berbusana sebagai perempuan. Maka, klaim bahwa LGBT “bukan bagian dari kebudayaan Indonesia” adalah salah.

Prinsip Kedua: LGBT Indonesian Pantas Dirangkul Apa Pun Sejarahnya

Walau penting untuk disebut, terdapat bahaya pada prinsip pertama. Sejarah homoseksualitas dan transgender di Indonesia bervariasi dan tidak dipetakan dengan baik dalam kehidupan LGBT kontemporer. *Warok* dan *bissu*, misalnya, adalah profesi, bukan identitas seksual. Mereka hanya untuk beberapa orang terpilih. Mereka terkait dengan etnisitas tertentu dan tidak ada persamaannya dengan banyak daerah lain di Indonesia. Bahkan, dalam keadaan “darurat LGBT” saat ini, sudah terdapat beberapa kasus yang menggunakan “tradisi lokal” untuk menjustifikasi sikap anti-LGBT (misal, di [Kepulauan Riau](#)). Lebih jauh, banyak gerakan agama garis keras melihat bahwa mengganti tradisi yang “tidak suci” adalah tujuan yang mulia. Kita tidak menginginkan kesetaraan dan inklusi hanya di beberapa bagian di Indonesia, atau hanya terbatas untuk beberapa golongan. Hak asasi Anda tidak bergantung pada silsilah historis Anda. Bahkan jika pun tidak memiliki masa lalu yang jelas, identitas LGBT modern tidak lebih palsu ketimbang identitas lain yang ada di nusantara ini, dan individu dengan identitas tersebut tetaplah orang Indonesia.

Prinsip Ketiga: Agama Tidak Membenarkan Penindasan

Kebudayaan nasional telah menjadi justifikasi utama “darurat LGBT,” tetapi krisis ini diutarakan sebagian dalam bahasa agama juga. Banyak orang Indonesia yang sangat

religius dan lebih daripada 85% populasi adalah Muslim. Tentu terdapat keragaman besar dalam pengalaman religius antara mereka yang sekuler dan mereka yang saleh, dan antara berbagai bentuk sekularisme dan kesalehan itu sendiri. Keragaman ini termasuk keberadaan Buddhisme, Katolik, Kong Hu Chu, Hindu, dan Protestan (semua diakui negara bersama Islam), begitu juga kepercayaan lain yang tidak diakui secara resmi. Agama adalah bagian dari kehidupan publik di Indonesia sebagaimana di berbagai belahan dunia, tetapi dalam “darurat LGBT” kali ini agama seringkali digunakan untuk membungkam perdebatan dan membatasi keragaman. Namun, semua agama memiliki keragaman dan perdebatan, dan banyak LGBT Indonesia religius. Pengalaman mereka, termasuk pengalaman pelik LGBT Muslim, perlu diakui (Boellstorff 2005b). Ada banyak orang Indonesia religius yang telah mengadvokasikan penerimaan terhadap LGBT Indonesia. “Darurat LGBT” tentunya tiba pada diskusi penting mengenai posisi agama di dalam masyarakat sipil Indonesia. LGBT Indonesia tidak pantas menjadi korban dari diskusi yang lebih luas ini.

Prinsip Keempat: LGBT Indonesia Tidak Mengancam Anak LGBT

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bersama dengan agama, isu lain yang dicampurkan ke dalam “darurat LGBT” adalah imbauan untuk melindungi anak. Selama lebih dari seabad dan di berbagai belahan dunia, pernyataan bahwa individu LGBT mengancam anak telah digunakan untuk menjustifikasi perlawanan terhadap hak LGBT (Rubin 1984). Dalam “darurat LGBT” ini, terdapat beberapa pernyataan bahwa individu LGBT melakukan pelecehan seksual atau merekrut anak-anak, seperti misalnya penahanan penyanyi pop Syaiful Jamil pada 18 Februari 2016, walaupun orang yang dituduh berhubungan seks dengannya (disebut anak laki-laki di beberapa [pemberitaan](#) mengenai penahanan) berumur 17 tahun. Akan tetapi, pernyataan tersebut pada umumnya dinyatakan dalam ancaman yang lebih umum terhadap “generasi muda” (frasa ini mengingatkan kita pada frasa *kaum muda* yang merujuk pada aktivis nasionalis muda pada periode akhir kolonial). Mungkin satu alasan untuk sifat umum “ancaman” itu adalah bahwa tidak ada kejahatan sungguhan yang terjadi: klaimnya adalah bahwa keberadaan LGBT Indonesia saja, dan khususnya kenampakan publik mereka, mengancam kaum muda. Mempertanyakan kebohongan itu penting untuk membuka dialog sesungguhnya mengenai LGBT Indonesia sebagai anggota resmi masyarakat sipil.

Prinsip Kelima: Keragaman Indonesia Perlu Menyertakan LGBT

Pada Desember 2015, abu ilmuwan politik dan sejarawan besar Benedict Anderson diturunkan dalam sebuah guci ke Laut Jawa. Buku Anderson yang paling masyhur, *Imagined Communities*, mengambil bukti dari berbagai belahan dunia untuk menjelaskan asal-usul nasionalisme modern (Anderson 1983). Namun, terlepas dari pengetahuan globalnya, sosok Anderson yang pertama dan terutama adalah sebagai akademisi tentang Indonesia. Kecintaannya pada negeri ini tidak bisa diperdebatkan,

begitu juga kemauannya untuk menantang intoleransi dan penindasan di nusantara ini. Dapatkah kita membayangkan komunitas nasional Indonesia benar-benar merangkul warganya yang LGBT? Karya Anderson membantu kita memahami bagaimana kebudayaan-kebudayaan nasional memiliki ciri-ciri tertentu yang sama di seluruh dunia, walaupun ada pula aspek-aspek yang unik. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” Indonesia jelas mencerminkan pengaruh global; ini hampir mirip dengan semboyan Amerika Serikat *E Pluribus Unum* dan semboyan serupa di tempat-tempat lain. Semboyan itu sesuai dengan nusantara yang luar biasa ini, dengan ribuan pulau dan ratusan kebudayaan lokalnya yang unik, yang semuanya terhubung dengan kebudayaan nasional dan berbagai pengaruh transnasional. Keberagaman Indonesia selama ini telah selalu menyertakan individu LGBT. Pertanyaannya adalah apakah mereka dapat menjalani hidup mereka dengan kebebasan yang selama ini merupakan seruan nasionalisme Indonesia sejak awal mulanya.

Referensi

Amar, Paul (2013), *The Security Archipelago: Human-Security States, Sexuality Politics, and the End of Neoliberalism*. Durham: Duke University Press.

Anderson, Benedict R. O’G (1983), *Imagined Communities: Reflections On the Origins and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Bellows, Laura (2011), “The Aroused Public in Search of the Pornographic in Indonesia.” *Ethnos* 76(2), 209–232.

Bennett, Linda Rae, and Davies, Sharyn Graham, eds. (2014), *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia: Sexual Politics, Health, Diversity and Representations*. New York: Routledge.

Blackwood, Evelyn (2010), *Falling into the Lesbi World: Desire and Difference in Indonesia*. Honolulu: University of Hawai’i Press.

Boellstorff, Tom (2004), “The Emergence of Political Homophobia in Indonesia: Masculinity and National Belonging.” *Ethnos* 69(4), 465–486.

Boellstorff, Tom (2005a), *The Gay Archipelago: Sexuality and Nation in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.

Boellstorff, Tom (2005b), “Between Religion and Desire: Being Muslim and Gay in Indonesia.” *American Anthropologist* 107(4), 575–585.

Boellstorff, Tom (2007), *A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia*. Durham: Duke University Press.

Boellstorff, Tom (2014), “Lessons from the Notion of ‘Moral Terrorism’.” In Thomas Stodulka and Birgitt Röttger-Rössler (eds.), *Feelings at the Margins: Dealing with Violence, Stigma, and Isolation in Indonesia*. Frankfurt: Campus Verlag, 148–158.

Brenner, Suzanne April (1998), *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java*. Princeton: Princeton University Press.

Penerjemah :
Maharani Karlina C.H
Editor :
Dini Andarnuswari



Canaday, Margot (2003), "Building a Straight State: Sexuality and Social Citizenship under the 1944 G.I. Bill." *Journal of American History* 90(3), 935–957.

Croft-Cusworth (2016), "This week in Jakarta: Terror, corruption and moral panic." *The Interpreter*, February 26, <http://www.lowyinterpreter.org/post/2016/02/26/This-week-in-Jakarta-Terror-corruption-and-moral-panic.aspx>.

Davies, Sharyn Graham (2007), *Challenging Gender Norms: Five Genders among the Bugis in Indonesia*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co.

Davies, Sharyn Graham (2016), "Indonesian 'tolerance' under strain as anti-LGBT furore grows." *Asian Studies Association of Australia*, <http://asaa.asn.au/indonesian-tolerance-under-strain-as-anti-lgbt-furore-grows/>

Lancaster, Roger N. (2011), *Sex Panic and the Punitive State*. Berkeley: University of California Press.

Murtagh, Ben (2013), *Genders and Sexualities in Indonesian Cinema: Constructing Gay, Lesbi, and Waria Identities on Screen*. New York: Routledge.

Oetomo, Dédé (2001), *Memberi Suara pada yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press.

Rubin, Gayle (1984), "Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality." In Carole S. Vance (ed.), *Pleasure and Danger*, London: Routledge & Kegan Paul, 267–319.

Suryakusuma, Julia I. (1996), "The State and Sexuality in New Order Indonesia." In Laurie Sears (ed.), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Durham: Duke University Press, 92–119.

Suryakusuma, Julia I. (2004), *Sex, Power, and Nation: An Anthology of Writings, 1979–2003*. Jakarta: Metafor Publishing.

UNDP, USAID (2014), *Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report*. Bangkok.

Wieringa, Saskia E. (2002), *Sexual Politics in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.

Yulius, Hendri (2015), *Coming Out*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.